PEMETAAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSU SENARU DI DESA SENARU LOMBOK UTARA

(*Conflict Mapping In Forest Area with Special Purpose Of Senaru In Nortn Lombok*)

Gian Prasetiawijaya
Program Studi Kehutanan Universitas Mataram

Email: prasetiawijaya95@gmail.com

ABSTRACT

Governance of forestry reflects on the 5 substances, namely: the rule of law, accountability, transparency, democratization, and the participation of the parties in forestry. One of the conditions of good forestry governance a white garment, the area of the conflict. Forest areas with a special purpose (KHDTK) Senaru is a permit provision of the forest area of education mandated to Mataram University ± 225.7 ha. This area was established based on the decision letter of the Minister of forestry number: SK. 392/Menhut-II/2004, dated October 18, 2004. But in its implementation, is found a few crucial issues, namely: the mastery of land illegally in various forms, such as the establishment of the buildings of the Inn, the cafe or home land, occupational certification, land, access roads, forest trails public toilets, to overlay the map. Research objectives (1) identifying and mapping the stakeholders based on influence and interests in the management of KHDTK Senaru, (2) map the current conflict between stakeholders based on the issue of the management of KHDTK Senaru. Methods used Snowball Sampling. The technique of collecting data through observation, semi-structured interviews, literature studies and literature to managers and stakeholders who have the influence and interests in the management of forest resources in KHDTK Senaru. Data analysis using the stakeholder analysis, referring to the key questions that have already been compiled. Based on the results of the identification of the influence of interests, the primary stakeholders in the management of the SDH in Senaru is KHDTK Manager KHDTK Senaru (Study Program Of Forestry Mataram University), Department of environment and forests of the province NTB and BKPH Rinjani West. The main issues that must be overcome is the Setup limits the area of certification of forest areas, the utilization of forest areas, community empowerment, stakeholder coordination, utilization of forest products and the quality and quantity of human resources Manager Senaru and KHDTK sharecroppers in KHDTK Senaru.

Keywords: *Stakeholder,* KHDTK, Senaru.

ABSTRAK

Prinsip tata kelola kehutanan terefleksi dalam 5 subtansi pokok, yaitu: supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, demokratisasi, dan partisipasi para pihak kehutanan. Salah satu syarat tata kelola kehutanan yang baik, bersihnya area dari konflik. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru adalah ijin peruntukan kawasan hutan pendidikan yang dimandatkan kepada Universitas Mataram seluas ± 225,7 ha. Kawasan ini dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004. Namun dalam implementasinya, ditemui beberapa persoalan krusial, yaitu: penguasaan lahan secara illegal dalam berbagai bentuk, seperti pendirian bangunan-bangunan penginapan, cafe ataupun rumah, sertifikasi lahan, okupasi lahan, akses jalur-jalan hutan, toilet umum, hingga tumpang-tindih peta. Tujuan penelitian (1) mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Senaru, (2) memetakan konflik saat ini antar *stakeholder* berdasarkan isu pengelolaan KHDTK Senaru. Metode yang digunakan *Snowball Sampling.* Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, studi pustaka dan literatur kepada pengelola dan *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di KHDTK Senaru. Analisis data menggunakan analisis

stakeholder, mengacu pada pertanyaan kunci yang telah disusun. Berdasarkan hasil identifikasi pengaruh-kepentingan, *stakeholder* primer dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru adalah pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan BKPH Rinjani Barat. Isu utama yang harus segera diatasi adalah penataan batas kawasan, sertifikasi kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi antar *stakeholder*, pemanfaatan hasil hutan dan kualitas dan kuantitas SDM pengelola KHDTK Senaru dan petani penggarap di KHDTK Senaru.

Kata Kunci : *Stakeholder,* KHDTK, Senaru.

PENDAHULUAN

Permasalahan tata kelola hutan pada kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan urusan tata kelola kawasan dan vegetasi hutan, namun justru yang lebih mengemuka adalah terkait dengan persoalan sosial. Sumber daya alam adalah objek yang diminati oleh banyak pihak, dengan kepentingan yang beragam. Karena SDA tidak hanya bernilai strategis secara lingkungan, tetapi melekat beragam nilai vital baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya termasuk politik (Markum dan Setiawan, 2017).

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (pasal 8), merupakan salah satu bentuk unit pengelolaan ditingkat tapak yang mengemban tugas sebagai mediator kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, Religi dan budaya. Peraturan kebijakan ini sebagai landasan hukum bagaimana KHDTK harus dikelola, termasuk KHDTK Senaru. Hal ini, sangat penting mengingat sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan Indonesia telah mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kualitas dan kuantitas. (Rappeto, 1988; Barber, 1982; Zerner, 1990; Peluso, 1920; dalamNurjaya, 2005).

Kawasan Hutan Senaru yang terletak di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 392/Menhut-II/2004 ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu sebagai kawasan hutan pendidikan dengan luasan areal $\pm$ 225.7 ha. Hutan Pendidikan Senaru saat ini dikelola dan dimanfaatkan sebagai laboratorium oleh Program Studi Kehutanan Universitas Mataram, sehingga melekat padanya fungsi-fungsi untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Idris *et al.* 2013; dalam Latifah *et al.* 2013).

Keterbangkalaian lahan KHDTK Senaru yang disebabkan oleh ketidak aktifan pengelola dan pengalihan penguasaan lahan (*land tenure*) tersebut, semakin diperparah dengan bertambahnya penguasaan lahan secara illegal dalam berbagai bentuk, seperti pendirian bangunan-bangunan penginapan, cafe ataupun rumah, sertifikasi lahan, hingga okupasi lahan (Latifah *et al.* 2013). Bahkan menurut informasi terbaru, dimana telah terjadi tumpang-tindih peta area kelola dengan HTI PT. Sadhana Arifnusa seluas 21, 45 ha.

Berdasarkan uraian di atas menjadi pertimbangan, bahwa sangat relevan dan penting untuk melakukan pemetaan konflik di KHDTK Senaru. Pencegahan terhadap eskalasi konflik yang lebih besar perlu dilakukan dengan memetakan konflik dan menganalisis para pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan dan berpengaruh dalam pemanfaatan KHDTK Senaru. Tujuan penelitian adalah (1) Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Senaru (2) Memetakan konflik saat ini antar *stakeholder* berdasarkan isu pengelolaan KHDTK Senaru.

METODE

Lokasi penelitian di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru, di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari, April-Mei 2018. Metode yang digunakan adalah *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, studi pustaka dan literatur kepada pengelola dan *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di KHDTK Senaru. Analisis data dilakukan dengan analisis *stakeholder*, mengacu pada pertanyaan kunci yang telah disusun.

Tabel 3.1 Metode Pengumpulan Data
Table 3.1 *Interpretation Data of Metod.*

No	Tujuan Penelitian	Variabel yang Diukur	Metode Pengumpulan Data
1	Menganalisis *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan.	Identitas serta pengaruh dan kepentingan *stakeholder*	Wawancara dan observasi lapangan.
2	Melakukan pemetaan konflik antar *stakeholder* berdasarkan isu pengelolaan KHDTK senaru.	1. Identifikasi konflik antar *stakeholder* dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru.	Wawancara, observasi lapangan, studi pustaka dan literatur.
		- Berdasarkan aktor konflik dan isu konflik	
		- Pohon konflik	
		2. Pemetaan konflik	
		- Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan	
		- Berdasarkan isu konflik	

Analisis data melalui analisis *stakeholder* untuk mendapatkan hasil substantif serta analisis pohon konflik untuk mengidentifikasi hubungan antara substansi dan isu pokok konflik. Analisis stakeholder digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. Model analisis stakeholder yang digunakan merupakan model yang diperkenalkan oleh Zulfikar (2013); dalam Reed et al. (2009) dengan tiga tahapan, meliputi identifikasi stakeholder, klasifikasi stakeholder, dan menggambarkan hubungan antar stakeholder, selanjutnya mengklasifikasikan *Stakeholder* kedalam *Key Player, Cortext Setter, Subject dan Crowd.* Kemudian *stakeholder* akan dikelompokkan kedalam *stakeholder* primer dan sekunder. Analisis pohon konflik dilakukan berdasarkan permasalahan inti, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari isu-isu konflik pengelolaan SDH di KHDTK Senaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Markum, Latifah dan Setiawan (2017), bahwa Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru, merupakan suatu kawasan hutan yang dikhususkan untuk tujuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi KHDTK Senaru terletak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Hutan Senaru ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 765/KPTS/UM/10/82 status sebagai hutan produksi dengan luas 225,7 ha. Kawasan ini sudah dikukuhkan menjadi hutan pendidikan diserahkan pengelolaannya kepada Universitas Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004. Dengan telah diberikan izin kepada Universitas Mataram, maka kewenangan urusan pengelolaan menjadi tanggungjawab Universitas Mataram, dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada lembaga dibawah Universitas seperti Unit Pengelola Teknis (UPT) Universitas, fakultas, atau lembaga penelitian. Dengan demikian, segala hal yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan kerjasama dalam pengelolaan kawasan adalah menjadi kewajiban pemegang ijin untuk melaksanakannya. Pihak lain yang dengan sengaja mengklaim memiliki ijin untuk pemanfaatan KHDTK Senaru, status ijin yang demikian batal demi hukum. Karena prinsip ijin di kawasan hutan adalah tidak boleh ada ijin ganda, atau ijin diatas ijin.

1. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan KHDTK Senaru

Berdasarkan hasil *inteview* dengan *stakeholder* yang terlibat dalam isu pengelolaan SDH di KHDTK Senaru, telah teridentifikasi beberapa masalah yang timbul dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru, yatu:

Tabel 4.3 Permasalahan di KHDTK Senaru
Table 4.3 Problem In Senaru KHDTK

Aapek	Identifikasi Masalah
1 Kelembagaan	1. Sk yang diterbitkan oleh Unram kepada pengelola KHDTK Senaru hanya dalam jangka per tahun 2. Kurangnya kemampuan organisasi pengelola untuk mengkoordinir isu pengelolaan SDH di KHDTK Senaru 3. Program pemberdayaan yang ditawarkan pengelola kepada masyarakat belum tepat sasaran/abu-abu 4. Informasi hasil riset terbaru tentang budidaya gaharu yang efektif tidak bisa diterapkan karena masyarakat sudah mengkapling kawasan KHDTK, tim gaharu center juga selama ini vakum, yaitu sejak paska proyek mereka tidak pernah berkegiatan.
2 Pelanggaran terhadap prinsip kemitraan	1. Adanya petani yang mengklaim lahan garapan yang telah dibagi melalui program HKm, sebagai hak milik 2. Adanaya kasus pemindahtanganan lahan garapan kepada penggarap lain maupun yang bukan penggarap
3 Aktifitas pembangunan *illegal* di dalam kawasan hutan	1. Pembangunan fasilitas pubik di kawasan KHDTK Senaru tanpa koordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Pengelola KHDTK Senaru 2. Adanya gejalah pendirian bangunan untuk tempat singgah dan rumah tinggal sementara
4 Pelanggaran terhadap batas kawasan	Adanya beberapa penggarap yang mengelola melebihi batas kawasan sehingga masuk ke TNGR
5 Perijinan	1. Batas kawasan KHDTK Senaru 225,7 ha belum dipahami oleh masyarakat, sehingga rentan terjadi klaim batas wilayah 2. Pihak PT. Sadhana Arifnus diindikasikan telah memasuki batas kawasan KHDTK Senaru yang dimasukkan kedalam wilayah HTI mereka 3. Adanya sertifikasi kawasan hutan yang dikeluarkan BPN Lombok Barat berdasarkan pipil bersegel garuda sekitar pada tahun 1954.

Dari segi geografis posisi KHDTK Senaru sangat strategis karena letaknya di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, tentu akan memberikan daya tarik kepada lemaga-lembaga pemerintah atau NGO yang igin mengembangkan potensi SDH baik secara fisik atau berbentuk dukungan materi. Terutama instansi pemerintah yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang parawisata dan budaya serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dinas Parawisata NTB dengan dorongan dari pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani telah membangun jalur jalan hutan di kawasan KHDTK Senaru dengan alasan untuk mempermudah akses para pendaki dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun tindakan Dinas Parawisata dan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani tidak melaui SOP yang benar, mereka membangunan fasilitas pubik di kawasan KHDTK Senaru tanpa berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola KHDTK Senaru sehingga tindakan tersebut dianggap illegal. Menurut bapak NS.

> *"Masyarakat juga mendukung pembangunan fasiilitas publik tersebut jika memang itu dianggap untuk keperluan umum dan akan bermanfaat bagi khalayak serta bukan untuk keperluan pribadi. Konsekuensinya pemerintah tidak boleh melarang masyarakat membuat pondok beratap seng tanpa pondasi di kawasan KHDTK Senaru terutama mereka juga menolak dan bahkan mengecam tindakan pihak pengelola KHDTK Senaru yang telah berencana merobohkan pondok-pondok milik masyarakat yang dianggap illegal karena pengelola KHDTK Senaru sendiri juga mendirikan bangunan permanen di dalam kawasan KHTK Senaru".*

Hal ini, kemudian menjadi argumentasi mereka sehingga tetap bertahan. Jika diproyeksikan, bangunan tersebut akan menjadi embrio adanya pemukiman dan sertifikasi di kawasan hutan. Kasus pemindahtanganan garapan masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Bapak IN.

> *"Persepsi yang berkembang ditengah-tengah sebagian masyarakat Desa Senaru bahwa lahan garapan yang telah diperoleh dari program HKm dianggap sebagai lahan milik yang bisa diperjual-belikan. Penggarap menjual kepada penggarap lain atau bukan penggarap dengan harga rendah, sebatas ganti rugi tanaman yang ada diatas lahannya".*

Program PHBM yang diinisiasi oleh Pak Parman melalui skema HKm telah memberikan dampak yang buruk pada saat ini. Menurut Bapak IN.

> *"Informasi hasil riset terbaru tentang jarak tanam gaharu yang efektif tidak bisa diterapkan karena masyarakat sudah mengkapling kawasan KHDTK Senaru, masyarakat akan meminta ganti rugi atas tanamannya apabila pengelola ingin menerapkan hasil riset terbaru pengembangan gaharu. Kondisi demikian sudah terjadi sejak tahun 2000-an, sebelum SK KHDTK Senaru diserahkan kepada Prodi Kehutanan Unram dengan berbagai kompleksitas masalahnya".*

SK yang diterbitkan oleh Unram kepada pengelola KHDTK Senaru hanya dalam jangka per tahun secara tidak langsung kelembagaannya juga diputus. Menurut Bapak MD.

> *"KHDTK Senaru harus memiliki lembaga yang dijamini keberlanjutannya sehingga arah program pengembangan KHDTK Senaru dapat lebih konsisten. Kesulitan pengelola sampai saat ini karena KHDTK Senaru belum memiliki Master Plan, idealnya suatu kawasan hutan harus memiliki Master Plane yang jelas seperti dimulai dari menentukan dimana lokasi penanaman, LAB, sarpras (satgas, mes dll). Prodi Kehutanan Unram sebagai pengelola hanya bisa beradaptasi, karena apabila mengganti program yang telah diinisiasi oleh Pak Parman sebagia pusat gaharu, hasilnya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Kondisi KHDTK Senaru sejak tahun 2017 berada dalam kekosongan pengelolaan, sebab Rektor Unram belum menerbitkan SK-nya. Suatu kawasan tanpa pengelola akan menjadi open acses, sehingga banyak kemungkinan yang akan terjadi di KHDTK Senaru apabila pemerintah tidak memonitor secara rutin*".

2 Memetakan Klasifikasi Intensitas kepentingan dan pengaruh *Stakeholder* dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru

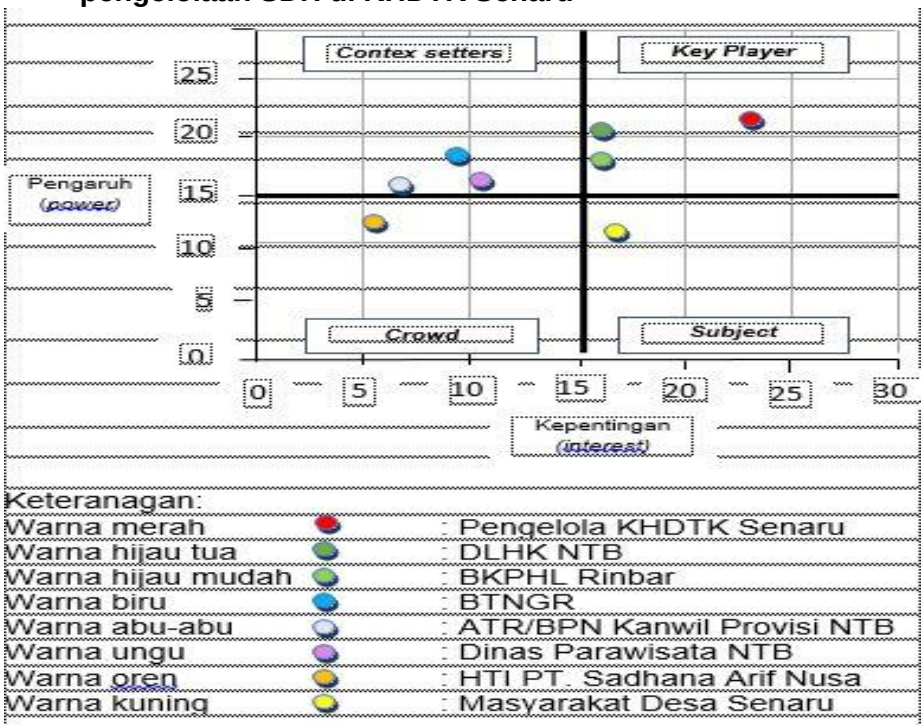

Gambar 4.2 Klasifikasi *Stakeholders* dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru

Figure 4.2 classification of Stakeholders in the management of the forest resource in Senaru KHDTK

Berdasarkan hasil klasifikasi *Stakeholders* dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru, pengelola KHDTK Senaru, DLHK NTB dan BKPHL Rinbar adalah *key player*. *Key player* merupakan *stakeholder* yang paling aktif dalam pengelolaan karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.

BTNGR, Agraria dan Tata Ruang/BPN Kanwil NTB dan Dinas Parawisata NTB adalah *Cortex Setters*. *Context setter* memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau.

HTI PT. Sadhana Arifnusa adalah *Crowd*. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit pengaruh dan kepentingan terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Masyarakat Desa Senaru adalah *Subject*. *Subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. *Stakeholder* jenis ini bersifat *supportive*, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi. Namun mereka dapat mempengaruhi yang lain jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya dan juga sebaliknya mungkin dapat dipengaruhi oleh *stakeholder* lainnya.

3 Penggolongan *Stakeholder* Primer dan Sekunder Berdasarkan Intensitas Pengaruh dan Kepentingan Dalam Pengelolaan SDH di KHDTK Senaru.

Tabel 4.7 Penggolongan *Stakeholder* Primer dan Sekunder Berdasarkan Intensitas Pengaruh dan Kepentingan Dalam Pengelolaan SDH di KHDTK Senaru.

Table 4.7 Classification of primary and secondary Stakeholders based on the intensity of the influence and interests in the management of the forest resource in Senaru KHDTK.

No	Penggolongan	*Stakeholder*	Pengaruh		Kepentingan	
			Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
1	Primer	Pengelola KHDTK Senaru	✓	-	✓	-
2		DLHK NTB	✓	-	✓	-
3		BKPHL Rinjani Barat	✓	-	✓	-
1	Sekunder	BTNGR	✓	-	-	✓
2		Dinas Parawisata NTB	✓	-	-	✓
3		ATR/BPN Kanwil NTB	✓	-	-	✓
4		PT. Sadhana Arif Nusa	✓	✓	-	✓
5		Masyarakat Desa Senaru	-	✓	✓	-

4. Identifikasi Konflik Antar *Stakeholder* Dalam Pengelolaan SDH Di KHDTK Senaru

4.1 Berdasarkan Aktor dan Isu Konflik

4.1.1 Konflik Antar Instansi Pemerintah

Tabel 4.8 Matriks Identifikasi Intensitas Konflik Antara Instansi Pemerintah Berdasarkan Isu Konflik di KHDTK Senaru

Table 4.8 the matrix identify the intensity of the conflict between government agencies based on the issue of conflict in Senaru KHDTK

Instansi Pemerintah	ATR/BPN	Dinas Parawisata NTB	Taman Nasional Gunung Rinjani	BKPH Rinjani Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelola KHDTK Senaru
Dinas Lingkungan Hidup dan	Tumpang tindih peta (mencuat),	Pemanfaatan kawasan hutan dan Koordinasi	Koordinasi antar instansi			Koordinasi antar instansi (tertutup)

Kehutanan	sertifikat hak milik dalam kawasan hutan, Koordinasi antar instansi (tertutup)	antar instansi (tertutup)	(tertutup)	-	-	
BKPH Rinjani Barat	Koordinasi antar instansi (tertutup)	Koordinasi antar instansi (tertutup)	Koordinasi antar instansi (tertutup)		-	Koordinasi antar instansi (tertutup)
Taman Nasional Gunung Rinjani	-	-	-	Koordinasi antar instansi (tertutup)		
Dinas Parawisata NTB	-	-	-			
ATR/BPN	-	-				
Pengelola KHDTK Senaru	Tumpang tindih peta (mencuat), sertifikat hak milik dalam kawasan hutan, Koordinasi antar instansi (tertutup)					

4.1.2 Konflik Antar Instansi Pemerintah Dengan Organisasi Non Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat Sekitar KHDTK Senaru

Tabel 4.9 Matriks Identifikasi Konflik Antara Instansi Pemerintah Dengan Organisasi Non pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat Sekitar KHDTK Senaru Berdasarkan Isu Konflik

Table 4.9 The matrix identify the conflict between government agencies With Non governmental Organizations, private companies and the public About Conflict Issues Based Senaru KHDTK

Instansi Pemerintah	HTI PT. Sadhana Arifnusa	Masyarakat Desa Senaru
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	*Ilegalloging*
BKPH Rinjani Barat	-	*Ilegalloging*
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	-	Pemanfaatan kawasan hutan
Dinas Parawisata NTB	-	-
ATR/BPN	-	-
Pengelola KHDTK Senaru	Tumpang-tindih peta area kelola dan koordinasi antar *stakeholder*	*Ilegalloging*, pemindahan tangan lahan garapan dari pihak pertama, pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan pasca panen, hasil riset budidaya gaharu tidak bisa diterapkan di KHDTK Senaru

4.2 Pemetaan Konflik

4.2.1 Berdasarkan Tingkat Pengaruh dan Kepentingan

Pemetaan konflik berdasarkan intensitas pengaruh-kepentingan para *stakeholder* primer dan sekunder dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru menjelaskan berbagai pengaruh-kepentingan *stakeholder* meliputi aliansi atau mitra kerja yang terjalin baik maupun yang retak, asal kewenangan, arah pengaruh atau kegiatan dan timbulnya konflik suatu isu antar *stakeholder*.

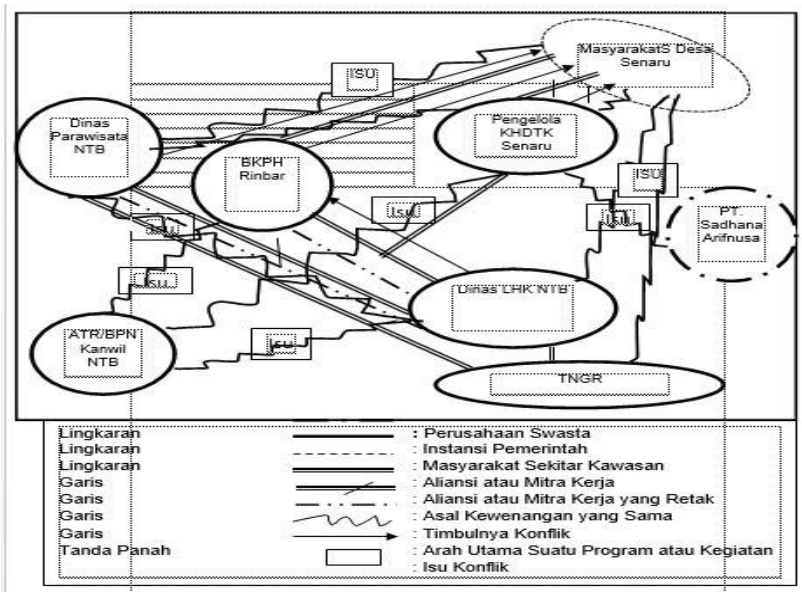

Gambar 4.6 Pemetaan Konflik Pengaruh dan Kepentingan Antar Keseluruhan *Stakeholder* dalam Pengelolaan SDH di KHDTK Senaru

Figure 4.6 Mapping Conflicts Between Interests and Influence the overall stakeholders in management of the SDH in Senaru KHDTK

4.2.2 Berdasarkan Isu Konflik

Stakeholder yang terlibat dari setiap isu meliputi:

1) Konflik yang terjadi antara pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram), Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dinas Parawisata NTB termasuk jenis konflik vertikal, berwujud laten dan menempati ruang konflik kepentingan.
2) Konflik yang terjadi antara Masyarakat Desa Senaru (penggarap KHDTK Senaru)-pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram) dan Masyarakat Desa Senaru-Balai Taman Nasional Gunung Rinjani termasuk jenis konflik vertikal, berwujud mencuat dan menempti ruang konflik data, konflik kepentingan dan konflik struktural.
3) Konflik yang terjadi antara pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram), Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kanwil NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat. termasuk jenis konflik vertikal, berwujud mencuat dan menempati ruang konflik data.
4) Konflik yang terjadi antara pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram) dan HTI PT. Sadhana Arifnusa termasuk jenis konflik vertikal, berwujud mencuat dan menempati ruang konflik data.
5) Konflik yang terjadi antara masing-masing internal pengelola KHDTK Senaru (Program Studi Kehutan Unram) dan internal masyarakat Desa Senaru (penggarap KHDTK Senaru) termasuk jenis konflik horizontal, berwujud laten dan menempati ruang konflik data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil identifikasi pengaruh-kepentingan, *stakehplder* primer dalam pengelolaan SDH di KHDTK Senaru adalah pengelola KHDTK Senaru Dinas LHK NTB dan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat. Dalam konteks pengelolaan SDH di KHDTK Senaru, isu utama

yang harus segera diatasi adalah penataan batas kawasan, sertifikasi kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi antar *stakeholder*, pemanfaatan hasil hutan dan kualitas dan kuantitas SDM pengelola KHDTK Senaru dan petani penggarap di KHDTK Senaru.

Untuk memastikan pengelolaan dan penyelesaian konflik yang efektif dan efisien diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan mendalami karakteristik konflik pengelolaan SDH di KHDTK Senaru.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Idris *et al.* 2013. *Studi Vegetasi Dan Cadangan Karbon Di Kawasan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru, Bayan Lombok Utara.* Mataram: Jurnal Ilmu Kehutanan Program Studi Kehutanan Universitas Mataram.

Latifah, Sitti *et al.* 2017. *Pengembangan Informasi Spasial Kelompok Tani Pade Angen Di KHDTK Senaru Melalui Pemetaan Partisipatif*. Mataram: Program Studi Kehutanan Universitas Mataram.

Markum dan Budhy Setiawan. 2017. *Survei Pemetaan Sosial Kawasan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko dan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Balai Knservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi NTB dan Program Studi Kehutanan Universitas Mataram.

Nurjaya, I Nyoman. 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan DI Indonesia.* Malang: Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Subarudin. 2008. *Tata Kelola Hutan Yang Baik: Sebuah Penbelajaran Dari Kabupaten Sragen.* Bogor: Pusat Penelitian Sosek dan Kebijakan Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan vol. 5 nomor 3.

Zulfikar, Muamar. 2013. *Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah*. Bogor: IPB Pres.